

Implementasi Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia: Systematic Literature Review 2020–2025

¹ Dean Setiyana, ² Nazwa AZ Zahro, ³ Aprianti Hananya, ⁴ Putri Kemala Dewi, ⁵ Khairani Alawiyah Matondang
^{1,2,3,4,5} Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan

E-mail: ¹ deansetiyana1@gmail.com, ² nazwaazzahro518@gmail.com, ³ apriantihananya248@gmail.com, ⁴ putrikemala@unimed.ac.id, ⁵ alawiyah@unimed.ac.id

ABSTRAK

Reformasi sektor publik di Indonesia menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah di Indonesia serta mengidentifikasi tahapan dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks akuntansi sektor publik, serta peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi periode 2020–2025 yang diperoleh melalui database Google Scholar dan portal jurnal nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa siklus akuntansi pemerintah daerah terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan penutupan buku. Implementasi siklus akuntansi yang sesuai dengan SAP berbasis akrual berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi dalam implementasinya, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah.

Kata kunci : akuntansi sektor publik, siklus akuntansi pemerintah daerah, SAP berbasis akrual, laporan keuangan daerah, transparansi keuangan

ABSTRACT

Public sector reform in Indonesia requires increased transparency and accountability in regional financial management. One important instrument in achieving this is the implementation of a local government accounting system based on accrual-based Government Accounting Standards (SAP). This study aims to analyze the implementation of the local government accounting cycle in Indonesia and identify the stages and challenges in its implementation. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) approach by analyzing various scientific literature relevant to the research topic. Data sources were obtained from national and international journal articles, public sector accounting textbooks, and government regulations related to regional financial management. The literature analyzed was limited to publications from 2020–2025 obtained through the Google Scholar database and National Journal Portal. The results of the study show that the local

government accounting cycle consists of several main stages, namely transaction identification, journal entry, posting to the ledger, preparing the trial balance, adjusting journal entries, preparing financial statements, and closing the books. The implementation of an accrual-based accounting cycle in accordance with SAP contributes to improving the quality of local government financial reports and supports transparency and accountability in public financial management. However, several challenges remain in its implementation, such as limited human resource competencies and utilization of local financial information systems.

Keyword : *accrual-based SAP, financial transparency, local government accounting cycle, local financial statements, public sector accounting*

1. PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik di Indonesia mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pada tingkat pemerintah daerah. Penerapan prinsip *good governance* menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks pemerintahan daerah, sistem akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2021; Rahayu, 2024; Sari et al., 2025).

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta mengelola keuangan daerah secara mandiri. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi yang

terstandarisasi menjadi sangat penting untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (Arif & Firmansyah, 2023; Kristiana et al., 2023; Purwanti, 2022).

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Sistem akuntansi berbasis akrual memungkinkan pemerintah untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi pada saat terjadinya transaksi, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dibandingkan dengan sistem berbasis kas. Implementasi SAP berbasis akrual di Indonesia secara resmi dimulai setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi pedoman bagi seluruh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan (Gamayuni, 2020; Hermawan, 2023; Muhtar, 2022).

Dalam praktiknya, sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang dikenal sebagai siklus akuntansi pemerintah daerah. Siklus akuntansi merupakan proses sistematis yang dimulai dari identifikasi transaksi, pencatatan dalam jurnal, pemindahan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan pada akhir

periode akuntansi. Penerapan siklus akuntansi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Mardiasmo, 2021; Kristiana et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh penggunaan sistem informasi yang terintegrasi. Pemerintah Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berfungsi untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah secara digital. Pemanfaatan sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Arif & Firmansyah, 2023; Sari et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Indonesia, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Penelitian yang secara khusus mengkaji siklus akuntansi pemerintah daerah sebagai suatu proses sistematis yang mengintegrasikan tahapan pencatatan transaksi hingga pelaporan keuangan masih relatif terbatas dalam perspektif kajian literatur.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah melalui pendekatan literature review terhadap berbagai penelitian yang diterbitkan dalam periode 2020–2025. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

2. LANDASAN TEORI

1) Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan sistem informasi yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi sektor swasta karena tujuan utama organisasi pemerintah bukanlah memperoleh keuntungan, melainkan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Mardiasmo, 2021).

Informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, evaluasi kinerja pemerintah, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan (Rahayu, 2024; Kristiana et al., 2023).

Selain itu, penerapan sistem akuntansi pemerintahan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara (Purwanti, 2022; Sari et al., 2025).

2) SAP Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan sistem pencatatan akuntansi yang mengakui transaksi keuangan pada saat hak dan kewajiban terjadi, bukan hanya pada saat kas diterima atau dibayarkan. Penerapan sistem ini memungkinkan pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan

yang lebih lengkap mengenai aset, kewajiban, pendapatan, serta belanja pemerintah (Gamayuni, 2020; Hermawan, 2023).

Implementasi SAP berbasis akrual juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar ini berkontribusi terhadap peningkatan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik (Muhtar, 2022; Kristiana et al., 2023).

Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan secara lebih komprehensif karena seluruh transaksi ekonomi dicatat secara sistematis dan terstruktur (Rahayu, 2024; Sari et al., 2025). Namun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman aparat pemerintah terhadap prinsip akuntansi berbasis akrual serta belum optimalnya infrastruktur teknologi informasi yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan daerah (Nasution et al., 2024).

3) Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah

Siklus akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian proses sistematis yang dilakukan dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah mulai dari identifikasi transaksi hingga penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Siklus akuntansi pemerintah daerah juga berkaitan erat dengan tahapan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam praktiknya, siklus ini tidak hanya mencakup proses pencatatan

transaksi keuangan, tetapi juga melibatkan tahapan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penelitian mengenai pengelolaan APBD menunjukkan bahwa siklus anggaran daerah terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa siklus APBD di tingkat pemerintah daerah mencakup empat tahapan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban (Tasyakurina et al., 2024). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa penyusunan APBD dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur (Zahra et al., 2024). Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sistematis guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Lebih lanjut, dalam perspektif akuntansi, siklus akuntansi merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi menggambarkan tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi (Kusmila & Carolina, 2024). Dengan demikian, siklus akuntansi pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian dalam pengelolaan keuangan publik agar setiap transaksi dapat dicatat secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis berbagai penelitian yang berkaitan dengan penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian serta temuan-temuan empiris yang relevan dengan topik kajian.

Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks akuntansi sektor publik, serta dokumen regulasi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa database ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci seperti *siklus akuntansi pemerintah daerah*, *standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual*, dan *sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)*.

Literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi dalam rentang waktu 2020–2025 agar mencerminkan perkembangan terkini dalam praktik akuntansi pemerintah daerah di Indonesia. Dari hasil pencarian awal diperoleh sejumlah artikel yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi topik, kualitas publikasi, serta kesesuaian dengan fokus penelitian. Setelah melalui proses seleksi, diperoleh 10 artikel ilmiah yang digunakan sebagai sumber utama dalam analisis penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik penelitian
2. Klasifikasi literatur berdasarkan fokus penelitian dan temuan utama
3. Analisis konsep serta hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi siklus akuntansi pemerintah daerah

4. Penyusunan sintesis hasil penelitian untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus akuntansi pemerintah daerah merupakan rangkaian tahapan sistematis dalam proses pencatatan, pengolahan, hingga penyajian informasi keuangan pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Proses ini menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Melalui penerapan siklus akuntansi yang terstruktur, pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Mardiasmo, 2021; Rahayu, 2024; Kristiana et al., 2023).

Namun demikian, implementasi SAP berbasis akrual masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan keterbatasan pemahaman aparatur pemerintah serta kesiapan sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan daerah (Nasution ET AL., 2024).

Sistem akuntansi yang diterapkan secara efektif akan membantu proses pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Selain itu, aparatur yang memiliki kompetensi akuntansi yang memadai akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat,

relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah (Dewi, Suraeda, & Diarespati, 2025).

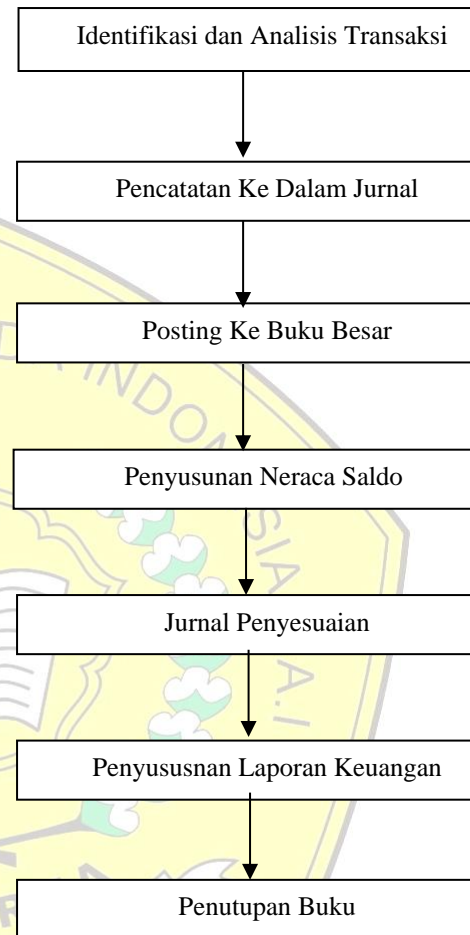
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, siklus akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan prinsip good governance. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan keuangan daerah (Purwanti, 2022; Muhtar, 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, proses akuntansi pemerintah daerah saat ini juga didukung oleh berbagai sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Salah satu sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah secara digital. Penggunaan sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Arif & Firmansyah, 2023; Sari et al., 2025).

Secara umum, siklus akuntansi pemerintah daerah terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berkaitan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara sistematis. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi transaksi hingga

penutupan buku pada akhir periode akuntansi.

Tabel 1. Diagram Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah



Tahap pertama dalam siklus akuntansi pemerintah daerah adalah identifikasi transaksi keuangan. Pada tahap ini, setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah dianalisis untuk menentukan dampaknya terhadap akun-akun dalam sistem akuntansi. Transaksi tersebut dapat berupa penerimaan pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, transaksi pembiayaan, serta transaksi lainnya yang mempengaruhi posisi keuangan pemerintah daerah (Hermawan, 2023).

Tahap berikutnya adalah pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah transaksi diidentifikasi, transaksi tersebut

dicatat dalam jurnal akuntansi sesuai dengan prinsip debit dan kredit yang berlaku dalam sistem akuntansi pemerintahan. Pencatatan ini dilakukan secara kronologis berdasarkan waktu terjadinya transaksi sehingga seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah dapat terdokumentasi dengan baik (Mardiasmo, 2021; Gamayuni, 2020).

Selanjutnya, transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan dipindahkan ke buku besar (posting). Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun yang sama sehingga memudahkan dalam proses pengolahan dan analisis informasi keuangan. Buku besar berfungsi sebagai sumber utama dalam penyusunan laporan keuangan karena berisi saldo dari masing-masing akun yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah (Kristiana et al., 2023).

Tahap berikutnya adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar saldo dari seluruh akun yang terdapat dalam buku besar pada suatu periode tertentu. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan keseimbangan antara jumlah debit dan kredit dalam sistem akuntansi. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka perlu dilakukan penelusuran kembali terhadap kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi pada tahap sebelumnya (Purwanti, 2022).

Setelah neraca saldo disusun, tahap selanjutnya adalah pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau yang memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Contohnya adalah pencatatan penyusutan aset tetap, pengakuan beban yang masih harus dibayar, serta pengakuan pendapatan yang masih harus diterima. Penyesuaian ini bertujuan agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara lebih akurat (Rahayu, 2024).

Tahap berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan biasanya meliputi beberapa komponen utama, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini menjadi sarana utama bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Muhtar, 2022; Sari et al., 2025).

Tahap terakhir dalam siklus akuntansi pemerintah daerah adalah penutupan buku. Pada tahap ini, akun-akun nominal seperti pendapatan dan belanja ditutup untuk mempersiapkan periode akuntansi berikutnya. Proses penutupan buku bertujuan untuk memastikan bahwa saldo akun yang akan digunakan pada periode berikutnya telah disajikan secara benar dan sesuai dengan kondisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan (Hermawan, 2023).

Dengan demikian, siklus akuntansi pemerintah daerah merupakan mekanisme penting dalam sistem pengelolaan keuangan publik. Penerapan siklus akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (Kristiana et al., 2023; Rahayu, 2024).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2020–2025, dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance. Penerapan siklus akuntansi yang mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual memungkinkan pemerintah daerah untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara sistematis mulai dari tahap identifikasi transaksi, pencatatan dalam jurnal, pemindahan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan dan penutupan buku pada akhir periode akuntansi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan siklus akuntansi yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta mendukung proses pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, beberapa penelitian dalam literatur masih menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam implementasi siklus akuntansi pemerintah daerah, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan, kompleksitas penerapan standar akuntansi berbasis akrual, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi siklus akuntansi tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi seperti SIPD juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai implementasi siklus akuntansi pemerintah daerah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi peran inovasi teknologi digital dalam meningkatkan kualitas sistem akuntansi pemerintah daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan tata kelola keuangan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiqoh, N. W. (2020). Application of accrual-based government accounting standards and obtaining fair opinions without exceptions. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(2), 120–130. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i2.12925>
- Arif, R. N. ., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Dewi, A. N., Suraeda, S., & Diarespati, D. (2025). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3370–3378. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7779>
- Gamayuni, R. R. (2020). The Initial Implementation Of Accrual Based Accounting, The Effect On Performance And Financial Reporting Quality At Local Governments In Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 14–28.

- <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v1i1i.1326>
- Hermawan, A. (2023). Readiness of Local Governments in the Application of Accrual-Based Accounting Standards. *MAR-Ekonomi: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(02), 42–48. <https://doi.org/10.58471/mar-ekonomi.v1i02.113>
- Kristiana, I., Erlangga, E. P., & Sinarasri, A. (2024). The Influence of Implementing Government Accounting Standards Based on Competence with The Use of Accounting Information Systems as A Moderation Variable. *Journal of Accounting Science*, 8(1), 72–87. <https://doi.org/10.21070/jas.v8i1.1748>
- Kusmila, Z., & Carolina, C. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA PONDOK SIGUANG KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT KABUPATEN KERINCI. *Jurnal Bangsa Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1855–1862. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i2.622>
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik: Edisi terbaru. Andi Offset.
- Muhtar, M. (2022). Non-compliance to SAP on local governments in Indonesia: The impact of internal control weaknesses in internal control in accounting and financial reporting and regional complexity. *Jurnal Penelitian*, 19(1), 11–22. <https://doi.org/10.26905/jp.v19i1.8261>
- Nasution, P. W., Wulandari, T., Nasirwan, N., Suhandi, S., & Hasanah, N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akruwal Terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 26–33. <https://doi.org/10.65510/jieb.v2i1.52>
- Purwanti, Ari. (2022). Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia. *Journal of Governance*. 7. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.15165>.
- Rahayu, Hastanti Agustin. Implementation of Accrual-based Government Accounting in Local Government: Bourdieu's Habitus Theory. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], v. 34, n. 9, p. 2173-2183, sep. 2024. ISSN 2302-8556 <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i09.p01>.
- Sari, K. D., Maelani, P., & Susilawati, D. (2025). Kinerja organisasi : sistem informasi akuntansi pemerintahan daerah (SIPD), komitmen organisasi dan pengendalian internal. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 2551–2563. <https://doi.org/10.32722/account.v12i1.7428>
- Sarma, G., Fitra, H., & Pebriyani, D. (2023). Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akruwal, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Pemerintahan Daerah Padang Pariaman. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(1), 69–83. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i1.5>
- Tasyakurina, N. B., Callista, E. T., Puspitasari, A. H., Wulandari, N. D., & Akbar, F. S. (2024). Analisis Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Krian Sidoarjo. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 158–171.

<https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2538>

- Uzma, Q. E., Aswat, I., & Dosinta, N. F. (2025). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2218-2228. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4308>
- Zahra, B. N., Angeli, N. G. F., Wijayanti, N. D., & Aliyyatud, A. (2024). Analisis siklus APBD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 4(2), 251-264. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i2.24347>

